

Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM)

E-ISSN: 2722-872X

IMPLEMENTASI SDG'S DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG

IMPLEMENTATION OF SDG'S IN OVERCOMING POVERTY IN TEMANGGUNG DISTRICT

Aulia Indah Sari ^{1✉}, Dra. Lucia Indrawati, M.Si²

Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

✉ auliaindahsari123@gmail.com

Abstrak

Kemiskinan terus menjadi tantangan utama dalam pembangunan nasional, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan serangkaian program dan kegiatan terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Namun, sampai sekarang masih banyak orang yang termasuk dalam kelompok populasi rentan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi indikator *Sustainable Development Goals* (SDG's) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung. Analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk membentuk deskripsi sistematis dari data yang tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung cukup serius dalam menanggulangi dan mengurangi kemiskinan, ini terlihat dari menurunnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Temanggung setiap tahunnya. Banyak target program indikator SDG's yang telah mencapai target dari tahun 2015-2019. Namun, terdapat sejumlah program yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung karena implementasinya masih jauh dari target yang diharapkan.

Kata kunci: Kemiskinan, Pembangunan Berkelanjutan, Temanggung

Abstract

Poverty continues to be a major challenge in national development, the Temanggung District Government has carried out a series of programs and activities in relation to poverty reduction. However, until now there are still many people who fall into the vulnerable population group. This study aims to determine the implementation of SDGs indicators in poverty reduction efforts in Temanggung Regency. Descriptive analysis is used in this research to form a systematic description of the available data. The results showed that the Temanggung Regency Government was quite serious in tackling and reducing poverty, this can be seen from the decreasing poverty rate in Temanggung District each year. Many SDGs indicator program achievements have achieved the target from 2015 to 2019. However, there are still a number of programs that become homework for the Temanggung Regency Government because the implementation is still far from the expected target.

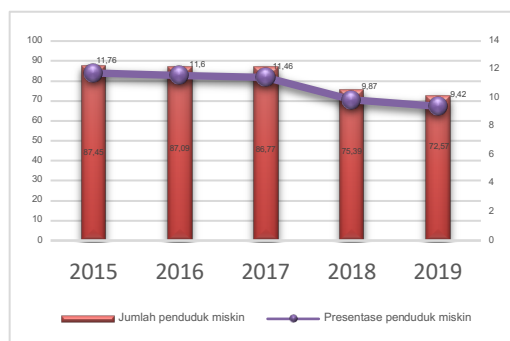
Keywords: Poverty, Sustainable Development, Temanggung

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu bagian dari isu global dan tantangan terbesar dalam pembangunan yang terus menjadi keprihatinan dari banyak negara di dunia terutama negara berkembang seperti Indonesia. Pada Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Derah (LP2KD) Kabupaten Temanggung (2019), Kemiskinan adalah Suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan kekuatan yang ia miliki.

Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2019 menempati posisi kedua terendah setelah Kota Magelang. Jika dibandingkan dengan presentase tingkat kemiskinan wilayah kabupaten lain di wilayah Eks Karesidenan Kedu, Presentase tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung mencapai presentase dibawah 10%, sedangkan kabupaten yang lainnya rata-rata berada pada presentase 11% atau bahkan diatasnya.

Tingkat kemiskinan meliputi besaran jumlah dan presentase penduduk miskin. Perkembangan jumlah dan presentase penduduk miskin di Kabupaten Temanggung Pada tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik 1 Perkembangan Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2019

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa pada periode 5 tahun terakhir yakni dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, perkembangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung relatif berfluktuasi dari tahun ke

tahun namun cenderung menurun yakni dari 11,76 persen pada tahun 2015 dan turun menjadi 9,42 persen pada tahun 2019. Angka kemiskinan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 2,34 persen atau dengan kata lain rata-rata setiap tahunnya mengalami penurunan sebesar 0,47 persen. Jika lebih dicermati lagi angka penurunan tertinggi terjadi di antara tahun 2017 hingga tahun 2018 yakni sebesar 1,59 persen. Jumlah penduduk miskin dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 14.880 jiwa atau dengan kata lain rata-rata penurunan setiap tahunnya sebesar 2.976 jiwa.

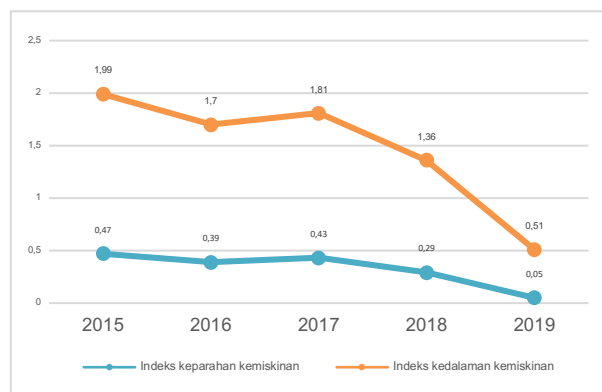
Kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tingkat pendidikan, pendapatan, akses terhadap barang dan jasa, kondisi geografis, kondisi lingkungan, dan gender. Ciri-ciri penduduk miskin di Kabupaten Temanggung antara lain yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran akan pendidikan, rendahnya kondisi kesehatan masyarakat, rendahnya tingkat pendapatan, keterbatasan keahlian, akses terhadap tanah dan modal yang terbatas. Selain itu Kabupaten Temanggung sangat rentan terhadap gejolak ekonomi, bencana alam, dan kurangnya keamanan individu.

Kemiskinan tidak hanya dilihat dari jumlah dan presentase penduduk miskin saja, namun juga dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index/PI*) merupakan suatu rasio kemiskinan yang menggambarkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin kecil nilai yang ditunjukkan oleh indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin rendah. Hal ini juga berarti rata-rata pengeluaran dari masing-masing penduduk miskin cenderung mendekati garis

kemiskinan yang berarti berkurangnya insiden kemiskinan. (BPS, 2019)

Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Indeks/P2*) merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran yang ada diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks keparahan kemiskinan menggambarkan semakin tingginya ketimpangan pengeluaran yang terjadi diantara penduduk miskin (BPS, 2019)

Adapun perkembangan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Temanggung tahun 2015-2019 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik 2. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2019

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2019 menunjukkan kecenderungan yang bervariasi. Indeks keparahan kemiskinan menurun pada tahun 2019 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin meningkat dan semakin mendekati garis kemiskinan. Hal ini mengindikasikan semakin ringannya upaya yang diperlukan untuk mengangkat orang miskin keluar dari kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Temanggung juga mengalami penurunan pada tahun 2019 yang mengindikasikan semakin menyempitnya

ketimpangan yang ada diantara penduduk miskin sehingga diperlukan adanya penyempurnaan pada ketepatan sasaran program-program dalam menjangkau penduduk miskin agar gar tersebut semakin dekat.

Dalam Laporan Tahunan TPB Kabupaten Temanggung Tahun 2019, *Sustainable Development Goals* (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sebagai isu ekonomi global yang menjadi perhatian seluruh negara di dunia, menghapus kemiskinan menjadi tujuan utama dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) (SDGs). Selain itu, kemiskinan juga menjadi salah satu tolak ukur terpenting dalam mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Temanggung memiliki beberapa indikator SDGs diantaranya yaitu presentase angka kemiskinan, jumlah keluarga sangat miskin ang memperoleh bantuan tunai bersyarat, preentase siswa miskin untuk menempuh pendidikan, dan beberapa indikator lainnya. Dikutip dari Laporan Tahunan TPB Kabupaten Temanggung Tahun 2019, sasaran global sesuai dengan tujuan pertama SDGs menghapus segala bentuk kemiskinan pada tahun 2030 adalah mengurangi setidaknya proporsi laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari semua usia yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi sesuai dengan definisi nasional.

Menindaklanjuti Agenda Global *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam kaitannya dengan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Temanggung dengan Keputusan Bupati Nomor 080/284/2017. Sebagai bentuk komitmen terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, Presentase Menurunnya Rumah Tangga Sasaran (Angka Kemiskinan) menjadi target indikator kinerja daerah yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung periode 2018-2023. Target indikator kinerja tersebut selanjutnya diterjemahkan kedalam beberapa rangkaian program dan kegiatan yang sistematis, yang selanjutnya menjadi landasan daerah dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD).

Pemerintah Kabupaten Temanggung mensinergikan peran antar masyarakat, pemerintah desa, dan kebijakan Pemerintah Daerah sebagai upaya yang komprehensif dalam menganggulangi kemiskinan sebagai wujud dari pengoptimalan ketepatan sasaran program dan kegiatan ataupun lokasi intervensi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung. Selain itu Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tim Penganggulungan Kemiskinan Kabupaten Temanggung pada tahun 2017. Selain itu pemerintah Kabupaten Temanggung telah menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Temanggung sebagai upaya mewujudkan sinergitas dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Strategi ini selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 yang sudah diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015

tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung berfokus pada empat strategi dasar yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil, Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Keempat strategi tersebut termuat dalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 yang selanjutnya akan diakomodir dalam beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai dengan tupoksinya.

LANDASAN TEORI

Kemiskinan

Menurut Todaro (2006), Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan dari seseorang untuk memenuhi standar hidup minimum yang sesuai dengan tingkat kelayakan hidup. Kemiskinan menjadi ukuran terpenting dalam mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Sehingga, kemiskinan terus menjadi tema utama dalam pemabangunan negara.

Todaro dan Smith (2004) menyebutkan bahwa kemiskinan terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor yakni :

- a. Tingkat pendapatan nasional yang rendah dan lambatnya laju pertumbuhan ekonomi
- b. Pendapatan per kapita dan laju pertumbuhannya sangat rendah dan berjalan lambat
- c. Adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan
- d. Mayoritas masyarakat berada di bawah tekanan kemiskinan absolute
- e. Kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan sangat terbatas

- f. Kurang memadainya fasilitas pendidikan dan kurikulum

yaitu pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan, pilar hukum dan tata kelola.

Pembangunan Berkelanjutan

Menurut Bruntland (1987) dari PBB, Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pemabangunan yang memiliki prinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan para generasi di masa depan”.

Dalam Buku Panduan SDGs Untuk Pemda, *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah sebuah kesepakatan pembangunan yang baru sebagai pengganti dari MDGs berlaku tahun 2015 sampai tahun 2030.

SDGs ini diharapkan dapat melanjutkan keberhasilan 8 program MDGs dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dunia dan dapat memberikan jawaban dari ketertinggalan pembangunan suatu negara di seluruh dunia. Perumusan agenda *Sustainable Development Goals* (SDG's) pada tingkat global melibatkan 193 pemimpin negara anggota PBB pada September 2015. Memiliki 5 prinsip dasar yaitu *people, planet, prosperity, peace, dan partnership* dalam 3 dimensi yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang selaras.

SDGs mengandung 17 tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku secara universal bagi seluruh bangsa di dunia. Dikutip dari Buku Panduan SDGs untuk Pemda Tahun 2016 17 tujuan tersebut diantaranya adalah menghapus kemiskinan; mengakhiri kelaparan; kesehatan yang baik dan kesejahteraan; pendidikan bermutu; kesetaraan gender; akses air bersih dan sanitasi; energi bersih dan terjangkau; pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; infrastruktur, industri dan inovasi; mengurangi ketimpangan; kota dan komunitas yang berkelanjutan; konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; penanganan perubahan iklim; menjaga ekosistem laut; menjaga ekosistem darat; perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat; kemitraan untuk mencapai tujuan. 17 tujuan ini dikelompokkan kedalam 4 pilar

METODE PENELITIAN .

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Kuncoro (2013), Penelitian deskriptif merupakan sebuah proses pengumpulan data yang nantinya akan diuji hipotesis atau menjawab suatu pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek penelitian. Sedangkan menurut Neuman (1997), Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menyajikan gambaran detail spesifik dari situasi, pengaturan sosial atau dari sebuah hubungan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung tahun 2015-2019. Selain dengan penelitian deskriptif, penelitian ini juga bersifat eksploratif dengan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai tantangan dan hambatan yang harus dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Temanggung dalam program penanggulangan kemiskinan serta menggambarkan mengenai capaian dari target-target penanggulangan kemiskinan dalam indikator SDGs.

Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Temanggung. Dasar pemilihan lokasi ialah komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mencapai tujuan utama SDG's yaitu mengurangi angka kemiskinan. Periode waktu yang diambil dalam penelitian ini ialah tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Target/Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan terhadap kondisi kemiskinan, dan capaian realisasi target indikator *Sustainable Development Goals*

(SDGs) tahun 2015-2019 di Kabupaten Temanggung.

Prosedur

Penelitian ini dimulai dengan merumuskan masalah, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data-data pendukung penelitian berupa data kemiskinan dan realisasi target SDGs Kabupaten Temanggung tahun 2015-2019 yang diperoleh dari sumber-sumber terkait. Setelah data diperoleh selanjutnya dilakukan analisis deskriptif terhadap data-data yang ada untuk kemudian dikembangkan.

Data, Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang bersumber dari buku, artikel, RPJMD, SPKD, Laporan Tahunan TPB, Laporan LP2KD, dan sumber-sumber terkait lainnya. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah tinjauan pustaka (*library research*).

Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan adalah teknis analisis induktif. Analisis data kualitatif bersifat analisis induktif, yaitu suatu analisis yang dilakukan berdasarkan data-data yang telah diperoleh untuk kemudian dikembangkan (Sugiyono, 2005).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Integrasi Indikator SDGs Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan di Kabupaten Temanggung

Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda global yang dirumuskan pada akhir September 2015 dengan melibatkan 193 pemimpin negara anggota PBB. Dalam agenda tersebut menghapus kemiskinan dalam segala

bentuk menjadi tantangan utama ditingkat global dalam mencapai pembangunan berkelanjutan mengingat kemiskinan sampai saat ini masih menjadi masalah hampir seluruh negara di dunia. Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam menindaklanjuti agenda global SDGs. Berdasarkan amanat dari Perpres tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2018.

Sebagai upaya tindak lanjut dari Agenda Global SDGs, Pemerintah Kabupaten Temanggung melakukan pemetaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator SDGs yang menghasilkan sebanyak 166 indikator yang telah disinkronkan dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, juga kedalam perencanaan pembangunan desa. Pengarusutamaan pencapaian TPB/SDGs dalam RPJMD, dan RKPD dilaksanakan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya. Sasaran indikator SDGs yang tertuang dalam RPJMN digunakan sebagai pedoman bagi semua pihak dan pemangku kepentingan dalam menyusun, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD).

Sebagai upaya mengoptimalkan ketepatan sasaran dari program dan kegiatan penanganan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan berbagai upaya yang komprehensif dalam menanggulangi kemiskinan dengan mensinergikan peran dan partisipasi antara

masyarakat, desa, dan pemerintah daerah secara menyeluruh dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan yang mengacu pada penanggulangan kemiskinan.. Pemerintah Kabupaten Temanggung menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Temanggung. Strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung berfokus pada perbaikan program perlindungan sosial, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat miskin, penciptaan lapangan kerja yang inklusif, memperluas kesempatan kerja, dan mengevaluasi efektivitas program penanggungan kemiskinan yang telah dilaksanakan.

Pencapaian Target Indikator SDGs Dalam Penanggulangan Kemiskinan

a. Angka Kemiskinan

Pencapaian target indikator angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Presentase Target, Realisasi dan Perubahan Angka Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2019

Tahun	Kabupaten Temanggung		
	Target	Realisasi	Perubahan
2015	11,50	11,76	0,21
2016	11,65	11,60	-0,16
2017	11,30	11,46	-0,36
2018	10,90	9,87	-1,37
2019	9,36	9,42	-0,45

Sumber : Laporan Tahunan TPB

Kab.Temanggung, 2019 (data diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Temanggung mampu merealisasikan target penurunan angka kemiskinan setiap tahunnya. Pada tahun

2019 presentase angka kemiskinan menurun dengan presentase perubahan sebesar 0,42% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, pada tahun 2019 realisasi penurunan angka kemiskinan mampu melebihi presentase yang ditargetkan sebesar 0,06%. Dari presentase tersebut dapat dikatakan bahwa segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menurunkan angka kemiskinan cukup berhasil.

b. Cakupan peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS

Cakupan peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS di Kabupaten Temanggung ditargetkan dapat terpenuhi 100%. Sampai dengan tahun 2018 pencapaian target ini di Kabupaten Temanggung baru mencapai 65%. Berdasarkan data dari BPJS Kabupaten Temanggung, jumlah penerima PBI di Kabupaten Temanggung terdapat 350.044 jiwa, meliputi 307.228 PBI APBN, 7.288 PBI APBD provinsi, dan 35.528 PBI APBD kabupaten.

c. Meningkatnya Kepesertaan Jamsostek

Indikator meningkatnya kepesertaan Jamsostek digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase perusahaan yang telah memiliki sarana hubungan industrial yang digunakan untuk menjamin kesejahteraan para tenaga kerjanya. Persentase pemenuhan sarana hubungan industrial Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Persentase Pemenuhan Sarana Hubungan Industrial

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Disabilitas yang memerlukan rehabilitasi sosial	40	44	40	40	247
2	Penyandang Disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial	40	44	40	40	247
3	Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos	100	100	100	100	100

Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2019

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah perusahaan seluruhnya	51	54	60	62	98
Jumlah perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial	280	397	397	397	397
Presentase	18,21	13,60	15,11	15,62	24,68

Sumber : Laporan Tahunan TPB Kab Temanggung, 2019 (data diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selama periode tahun 2015-2019 meskipun presentase perusahaan yang memenuhi PKB/PP dan kepesertaan BPJS masih dibawah 20% namun cenderung selalu meningkat setiap tahunnya. Ini berarti upaya pemerintah Kabupaten Temanggung dalam indikator ini bisa

dikatakan cukup berhasil meskipun harus ada upaya yang lebih baik lagi agar kepesertaan jaminan kesehatan dapat menjangkau seluruh pekerja yang ada.

d. Persentase Penyandang Disabilitas Yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat, dan Panti/Barehsos

Ragam disabilitas di Kabupaten Temanggung terdiri dari para penyandang disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental dan atau sensorik. Realisasi penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat, dan panti/barehsos Kabupaten Temanggung tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3. Persentase Penyandang Disabilitas Yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat, dan Panti/Barehsos

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2019 (data diolah)

Dari tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 capaian target rehabilitasi penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dapat terpenuhi 100%. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Sosial dan beberapa komunitas sosial berhasil dalam membantu para penyandang disabilitas.

e. Persentase Anak Terlantar dan lanjut Usia Terlantar Yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Panti/Barehsos

Realisasi target rehabilitasi anak terlantar dan lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial

berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos di Kabupaten Temanggung tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini :

Tabel 4. Persentase Anak Terlantar dan lanjut Usia Terlantar Yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Panti/Barehsos Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah anak terlantar dan lansia terlantar yang mendapatkan pendampingan sosial	62	122	181	97	47
2	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang di tangani	-	5	14	7	8
3	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang didampin gi masuk dalam PPSLU	-	5	14	7	8
4	Jumlah ABH yang ditangani	-	14	6	7	-
5	Jumlah ABH yang mendapatkan pendampin gan	-	14	6	7	-
6	Jumlah AMPK yang di tangani	-	35	37	10	23
7	Jumlah AMPK yang mendapatkan Pendampin gan	-	35	37	10	23
8	Jumlah anak terlantar yang di - tangani	52	53	54	23	20

9	Jumlah Anak terlantar yang mendapat akan pendampi ngan Sosial ke PPSA	52	53	54	23	20
10	Jumlah Anak terlantar yang ditangani	20	15	70	50	10
11	Jumlah Anak terlantar luar panti yang mendapat Bimbinga n sosial dan rehabilita si sosial	20	15	70	50	10

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2019 (data diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 jumlah anak dan lanjut usia terlantar di Kabupaten Temanggung cenderung fluktuatif, dengan jumlah terbanyak terdapat pada tahun 2017 yakni 181 orang. Capaian rehabilitasi anak dan lansia terlantar di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terpenuhi 100%. Pendampian anak terlantar disesuaikan dengan latar belakang masing-masing, sedangkan untuk lansia terlantar dilakukan pendampingan untuk masuk PPSLU (Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia).

f. Persentase Fakir Miskin yang Memperoleh Penanganan Sosial Usaha Ekonomi Produktif

Realisasi target penanganan sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada fakir miskin di Kabupaten Temanggung tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini :

Tabel 5. Persentase Fakir Miskin yang Memperoleh Penanganan Sosial Usaha Ekonomi Produktif di

No	Keterangan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Jumlah rumah tidak layak huni	3685	3500	3320	2662	2420	
1.	Jumlah KK miskin (data kemiskinan)	68,904	68,904	101,992	101,992	103,280	
2	Jumlah KK Miskin yang mendapat bantuan Usaha Ekonomi Produktif	1953	1963	320	380	336	
2.	Jumlah rumah yang mendapat bantuan Usaha Ekonomi Produktif	68	85	198	207	227	
3	Persentase Persentase Fakir Miskin yang Memperoleh Penanganan Sosial Usaha Ekonomi Produktif	18,81,23	17,820,46	16,760,32	13,260,68	11,930,33	

Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2019

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah keluarga miskin di Kabupaten Temanggung setiap tahunnya selalu bertambah sedangkan jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan usaha ekonomi produktif jumlahnya fluktuatif bahkan menurun pada tahun 2019. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Temanggung untuk lebih bekerja keras dalam menangani keluarga miskin yang ada di Kabupaten Temanggung.

g. Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Realisasi target penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Temanggung tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini :

Tabel 6. Presentase Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2019

No	Uraian	TAHUN ANGGARAN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah korban bencana	110	80	119	66	55
2.	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	110	80	119	66	55
3.	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah rumah tangga tidak layak huni di Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 selalu menurun setiap tahunnya. Hal ini terjadi dikarenakan selalu ada penanganan rumah tangga tidak layak huni yang selalu bertambah setiap tahunnya. Meskipun presentase yang tertangani masih dibawah 20% namun jika dilihat dari jumlah RTLH yang tertangani setiap tahunnya bertambah, ini menunjukkan upaya pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menangani RTLH cukup berhasil.

h. Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Sosial

Realisasi target penanganan korban bencana dengan layanan perlindungan sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini :

Tabel 7. Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Sosial di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2019

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2019 (data diolah)

Dari tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 target korban bencana alam yang mendapatkan layanan perlindungan sosial dapat terpenuhi 100%. Hal ini terjadi karena setiap kali terjadi bencana, pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Sosial selalu sigap dalam memberikan perlindungan sosial agar para korban bencana tidak terlantar dan kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Temanggung

Dalam menanggulangi kemiskinan Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak hanya melalui para Perangkat Daerah terkait saja, namun juga didukung oleh pihak-pihak dari luar Pemerintah Kabupaten Temanggung antara lain yaitu Pemerintah Pusat melalui program dan kegiatan yang bersumber dari APBN, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui program dan kegiatan yang bersumber dari APBD provinsi, Pemerintah Desa melalui program dan kegiatan yang bersumber dari APBDes, Lembaga swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSLP), dan juga organisasi masyarakat seperti BAZNAS dan LAZIS.

Strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung dikelompokkan ke dalam empat strategi yakni sebagai berikut :

1. Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin

Program dan kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah antara lain Dinas Sosial; Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; Dinas Kesehatan; Dinas Perhubungan; Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman; Bagian

Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; dan Rumah Sakit Umum Daerah dengan menggunakan sumber dana dari APBD Kabupaten Temanggung. Sedangkan untuk program dan kegiatan yang bersumber dari dana non APBD dilaksanakan oleh lembaga sosial dan organisasi masyarakat.

2. Meningkatkan Kemampuan dan Pendapatan Masyarakat Miskin

Program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah antara lain Dinas Sosial; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; Dinas Tenaga Kerja; dan Dinas Peternakan dan Perikanan dengan menggunakan sumber dana dari APBD Kabupaten Temanggung. Sedangkan untuk program dan kegiatan yang bersumber dari dana non APBD dilaksanakan oleh lembaga sosial dan organisasi masyarakat.

3. Mengembangkan dan Menjamin Keberlanjutan UMKM

Program dan kegiatan dalam rangka mengembangkan dan menjamin keberlanjutan UMKM merupakan tanggung jawab dari Dinas perindustrian, perdagangan dan UKM. Adapun kegiatan yang mendukung strategi ini adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan permodalan UKM
- b. Pelatihan dan sosialisasi, pendataan UMKM, Pembinaan dan pengembangan produk berbasis ovop, dan pengembangan permodalan.

4. Sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

Program dan kegiatan dalam strategi sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

yang bersumber dari dana APBN dilaksanakan oleh Dinas Sosial; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Komunikasi dan Informatika; Bappeda; Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UKM; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sedangkan untuk program dan kegiatan yang bersumber dari dana non APBD dilaksanakan oleh lembaga sosial dan organisasi masyarakat.

Permasalahan dan Kendala Implementasi SDGs Dalam Penanggulangan Kemiskinan

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan tentu akan menghadapi beberapa permasalahan dan kendala yang harus dihadapi. Begitu pula Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mengimplementasikan indikator kedalam upaya penanggulangan kemiskinan juga harus menghadapi beberapa permasalahan dan kendala dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan Siswa Miskin (BSM) diantaranya adalah
 - 1) Data sasaran siswa yang menerima bantuan sosial berasal dari usulan sekolah yang terkadang data ini sering kali tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sehingga diperlukan pendataan yang lebih luas dan obyektif bagi siswa yang memenuhi kriteria penerima BSM, atau menggunakan data yang telah direkomendasikan oleh Dinas Sosial dalam Data Kemiskinan Daerah yang telah dimuktahirkan agar program ini lebih tepat sasaran.

- 2) Banyak sekolah yang mengeluhkan terbatasnya kuota Bantuan Siswa Miskin (BSM), padahal jumlah siswa yang memerlukan bantuan masih sangat banyak. Sehingga diperlukan penambahan kuota siswa penerima BSM, agar program ini dapat menjangkau seluruh siswa miskin yang ada dan agar tidak ada anak yang putus sekolah karena masalah biaya.
 - 3) Terbatasnya kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kegiatan BSM, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia dengan kualitas yang lebih baik agar pelaksanaan kegiatan pemberian BSM dapat lebih optimal
- b. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan krisis kesehatan dan keluarga bencana (KB) diantaranya adalah
 - 1) Tidak semua masyarakat miskin di Kabupaten Temanggung memiliki BPJS, sehingga diperlukan bantuan yang berasal dari sumber dana yang lain diluar iuran BPJS kesehatan.
 - 2) Anggaran kegiatan penanggulangan krisis kesehatan dan keluarga bencana masih bersifat persediaan, anggaran ini hana digunakan sesuai dengan klain yang diberikan oleh puskesmas maupun rumah sakit sehingga tidak bisa diperkirakan secara tepat untuk rencana penganggaran tahun berikutnya.
 - c. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pembayaran iuran jaminan kesehatan diantaranya adalah
 - 1) Diperlukan waktu yang lama untuk sinkronisasi antara hasil verifikasi dan validasi data sasaran penerima iuran jaminan kesehatan dari Dinas Sosial dengan sistem BPJS. Sehingga

- diperlukan adanya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi data sasaran penerima manfaat iuran jaminan kesehatan atau BPJS
- 2) Terdapat informasi bahwa iuran jaminan kesehatan akan naik menjadi 100% mulai tahun 2020, sedangkan rencana anggaran yang tercantum di Renja masih menggunakan hitungan yang lama, jika kenaikan 100% tersebut benar terjadi maka anggaran akan kurang. Sehingga diperlukan adanya penambahan jumlah anggaran untuk premi BPJS bagi para penduduk miskin.
 - d. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sosial pembangunan jamban bagi keluarga miskin yang belum memiliki jamban adalah input data dalam kegiatan ini sangat banyak sehingga kecenderungan adanya kesalahan pengetikan akan sangat besar oleh karena itu diperlukan adanya menu tambahan di aplikasi e-planning seperti tambahan menu berupa data sasaran penerima manfaat bantuan sosial pembangunan jamban dari Data Kemiskinan Daerah yang *ter-update* setiap saat agar kegiatan ini dapat berlajal dengan lebih efektif dan efisien serta dapat meminimalisir adanya kesalahan pengetikan dalam proses input data.
 - e. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pemberian jaminan sosial lanjut usia non potensial adalah capaian target jumlah sasaran jaminan sosial lanjut usia non potensial masih jauh dari target SPM yaitu sebesar 4,8%. Dari 6.136 orang laerdapat lanjut usia non potensial di Kabupaten Temanggung, setiap tahunnya baru terdapat 400 orang yang mendapatkan bantuan sosial atau sekitar 0,06%. Sehingga diperlukan adanya peningkatan jumlah sasaran penerima bantuan jaminan sosial lanjut usia non potensial serta diperlukan adanya akses dana yang berasal dari sumber lain yang ada di masyarakat.
 - f. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan dalam proses pemakaman anak panti asuhan adalah sebagai berikut :
 - 1) Dalam pemberian bantuan pemakaman anak panti asuahn dibutuhkan persyaratan SKTM dalam proses pencairannya, hal ini seharusnya tidak dilaksanakan mengingat anak panti asuhan adalah anak yang sudah jelas miskin dan terlantar sehingga butuh pengasuhan alternatif yang tentunya akan kesulitan jika harus mengurus SKTM.
 - 2) Jumlah penyerapan anggaran tidak selalu 100% sepenuhnya terserap. Hal ini dikarenakan jumlah anak panti asuhan sering kali berubah karena ada yang lulus sekolah, pindah, bekerja, diadopsi atau bahkan kembali ke rumah orang tuanya.
 - g. Permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan program pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) diantaranya adalah
 - 1) Kurangnya pemantauan dalam pemberian bantuan UEP karena terbatasnya jumlah sumber daya manusia dari Dinas Sosial sehingga banyak dari penerima bantuan ini yang tidak berkembang. Sehingga diperlukan adanya kerjasama dengan Tim penanggulangan kemiskinan yang ada di desa/kelurahan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih intens agar UEP dapat berkembang sebagaimana mestinya

- 2) Kualitas sumber daya manusia penerima manfaat bantuan UEP cenderung rendah dan terbatas, sehingga menyebabkan kurangnya semangat dalam mengembangkan UEP. Hal ini menunjukkan diperlukannya integrasi antar perangkat daerah dalam memberikan pembinaan lebih lanjut untuk pengembangan UEP
- 3) Keterlambatan proses pencairan bantuan dikarenakan adanya masalah dalam syarat administrasi dari penerima. Diperlukan adanya koordinasi antara Dinas Sosial dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil khususnya dalam hal pengurusan administrasi kependudukan masyarakat miskin mengingat sebagian dari mereka tidak paham dengan prosedur pengurusannya.
- h. Permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tangga tidak layak huni adalah sebagai berikut :
 - 1) Anggaran kegiatan yang terbatas menyebabkan tidak semua sasaran atau rumah tangga tidak layak huni menerima bantuan
 - 2) Besaran bantuan bagi setiap sasaran sering kali berbeda-beda di setiap daerahnya sehingga menimbulkan berbagai macam bentuk pertanyaan/permasalahan di benak masyarakat
 - 3) Stimulan rehabilitasi sosial RLTH memerlukan bantuan penggalangan swadaya dari masyarakat sekitar sehingga jika makin banyak stimulan yang diberikan disuatu daerah, amak semakin besar pula swadaya masyarakat yang dibutuhkan. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan di lingkungan masyarakat sekitar. Diperlukan adanya pembatasan jumlah unit RS-RLTH di suatu wilayah agar tidak memberatkan masyarakat sekitar dalam menggalang swadaya. Idealnya dalam satu dusun maksimal ada dua unit rehabilitasi sosial RLTH.
- 4) Diperlukan adanya koordiansi diantara para perangkat daerah untuk memberikan komplementaris kegiatan rehabilitasi sosial RLTH seperti dengan memberikan bantuan jamban, saluran air bersih, dan pemasangan listrik agar kegiatan ini dapat berjalan dnegan lebih efektif dan efisien
- i. Permasalahan dan kendala dalam peaksanaan program pemberian bantuan jaminan sosial disabilitas cacat berat dan ganda adalah diperlukan adanya cakupan penerima manfaat bantuan yang lebih luas dalam membantu memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar para disabel. Diperlukan adanya penggalangan sumber dana lain dalam upaya membantu para disabel memenuhi kebutuhannya.
- j. Permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan program pemberian santunan kematian adalah dibutuhkan adanya sumber daya manusia yang selalu siap siaga dalam melayani permohonan bantuan santunan setiap harinya dikarenakan tidak ada petugas khusus yang ditugaskan dalam kegiatan ini.
- k. Permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebagai berikut :
 - 1) Sering kali pemberian bantuan PKH tidak tepat pada sasaran. Seharusnya penerima manfaat diambil dari Data Kemiskinan Daerah (DKD) agar lebih tepat pada sasaran

- 2) Pergantian sasaran penerima bantuan sulit dilakukan karena sangat bergantung pada sistem dari Kementerian Sosial. Diperlukan adanya bantuan sosial dari sumber dana selain APBN dikarenakan tidak semua sasaran bisa menerima bantuan PKH.
 - 3) Tidak ada kesadaran diri dari sasaran penerima manfaat yang sudah mampu untuk mengundurkan diri.
 - 4) TKPK Kecamatan sering merasa tidak dianggap dikarenakan belum semua pendamping PKH memberikan informasi data sasaran kepada pengampu PKH di wilayah kecamatan. Diperlukan adanya koordinasi diantara pendamping PKH dengan perangkat di desa, keluarahan maupun di kecamatan agar akses informasi terkait pemberian PKH lebih lancar dan efisien.
- l. Permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan program pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah adanya penerima bantuan yang tidak mencairkan bantua setiap bulannya dikarenakan bekerja atau posisinya berada di luar kota. Hal ini menajdi masalah karena pada saat ia pulang ia tidak dapat mencairkan bantuannya dikarenakan pencairan diatur dalam sistem setiap bulannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Mengentaskan kemiskinan dalam segala bentuk menjadi tujuan utama dari agenda global *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sebagai tidak lanjut dari agenda tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Sosial dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah telah

serius dalam mengurangi dan mengentaskan kemiskinan yang sesuai dnegan program SDGs. Hal ini terlihat dari menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung setiap tahunnya. Banyak capaian program indikator SDGs yang berhasil mencapai target dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Selain capaian yang telah mencapai target tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung masih harus terus menjalankan program-program penanggulangan kemiskinan yang lainnya karena masih ada beberapa program yang belum terlaksana dengan baik atau dapat diaktakan masih jauh dari target yang diharapkan. Hal-hal yang masih menjadi kendala dan menghambat tercapainya target indikator SDGs dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

1. Data kemiskinan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya menyebabkan banyak kegiatan tidak tepat pada sasaran
2. Kurangnya koordinasi antara perangkat daerah dalam upaya penanguangan kemiskinan sehingga menyebabkan programm dan kegiatan yang dilaksanakan kurang efektif dan efisien
3. Dibutuhkan dorongan dan dukungan politis terhadap program dan kegiatan pengentasan kemiskinan untuk menguatkan upaya semua pihak dalm pemberdayaan masyarakat miskin
4. Terbatasnya anggaran menyebabkan pemberian bantuan sosial dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum menjangkau sekuruh sasaran yang membutuhkan.

Saran

Pemerintah Kabupaten Temanggung harus meningkatkan kerja sama koordinasi dan komunikasi yang efektif dengn pihak-pihak

yang terkait dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung. Agar target yang ada dalam indikator SDG's dapat tercapai dengan baik dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Temanggung.

Implikasi dan Keterbatasan

Hasil penelitian ini memberikan bukti baru bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Temanggung cukup berhasil dalam mengentaskan kemiskinan di daerahnya dilihat dari banyak capaian program indikator SDGs yang telah berhasil mencapai target. Dengan adanya program-program tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang pengentasan kemiskinan, angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung dapat berkurang dari tahun ke tahun.

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan penelitian yakni Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dinas-dinas terkait. Data yang disediakan seringkali tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau bahkan ditahun-tahun tertentu ada data yang kosong sehingga mengakibatkan hasil penelitian kurang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan mengakibatkan informasi yang didapat kurang akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Kabupaten Temanggung. (2018). *RPJMD 2018-2023*. Temanggung: Bappeda.
- Bappeda Kabupaten Temanggung. (2019a). *Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)*. Temanggung: Bappeda.
- Bappeda Kabupaten Temanggung. (2019b). *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)*. Temanggung: Bappeda.
- BPS. (2019). *Badan Pusat Statistik Republik Indonesia*. Jakarta.
- Bruntland, G. . (1987). *Report of The World Commission on Environment and Development*. The United Nation.
- Erwandari, N. (2017). *Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan*. 5(3), 875–888.
- Hardiana, D. R. (2018). *Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Pembangunan Kota Berkelanjutan di Jakarta*. (May).
- INFID. (2016). *Buku Panduan SDGs Untuk Pemda dan Pemangku Kepentingan*. Jakarta Selatan: INFID.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis dn Ekonomi* (Edisi 4). Jakarta: Erlangga.
- MP Todaro, & Smith, S. C. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Neuman, w L. (1997). *Sosial Reseachr Methods : Qualitative and Quntitative Approaches 3rd Edition*. Boston: Allyn and Bacon.
- Sosial, D. (2019a). *Indikator Kinerja Perangkat Derah Dinas Sosial*. Temanggung: Dinas Soisal.
- Sosial, D. (2019b). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Temanggng Tahun 2019*. Temanggung: Dinas Sosial.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Temanggung, B. K. (2019). *Laporan Tahunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Temanggung Tahun 2019*. Temanggung: Bappeda.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Edisi Kese). Jakarta: Erlangga.